

# **SKRIPSI**



## **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI TENTARA (*CHILD SOLDIER*) DALAM KONFLIK BERSENJATA**

**OLEH  
ADILLAH ALIFYA ARZAM  
B111 12 151**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERERUTAN ANAK  
SEBAGAI TENTARA (*CHILD SOLDIER*) DALAM KONFLIK  
BERSENJATA**

**OLEH**

**ADILLAH ALIFYA ARZAM**

**B111 12 151**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana

**Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
2017**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI TENTARA (*CHILD SOLDIER*) DALAM KONFLIK BERSENJATA

Disusun dan diajukan oleh:

**ADILLAH ALIFYA ARZAM**  
**NIM B111 12 151**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 8 Agustus 2017 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

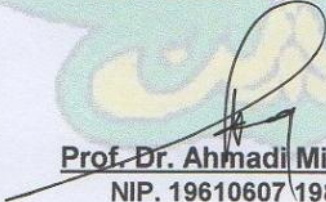
Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.**  
NIP. 19550803 198403 1 002

  
**Dr. Maskun, S.H., L.L.M**  
NIP. 19761129 199903 1 005

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADILLAH ALIFYA ARZAM

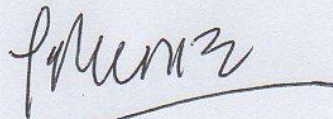
Nomor Pokok : B111 12 151

Judul : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI TENTARA  
(*CHILD SOLDIER*) DALAM KONFLIK  
BERSENJATA

Telah diperiksa dan disetujui untuk dilanjutkan dalam menempuh ujian  
skripsi :

Makassar, Juni 2017

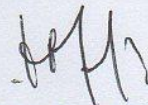
**PEMBIMBING I**



Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.

NIP. 19550803 198403 1 002

**PEMBIMBING II**



Dr. Maskun, S.H., L.L.M.

NIP.19761129 199903 1 005





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

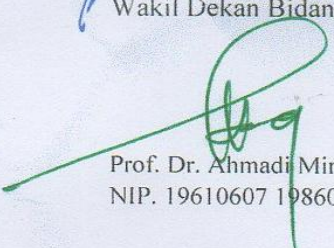
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ADILLAH ALIFYA ARZAM
Nomor Pokok	: B11112151
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perekrutan Anak Sebagai Tentara (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## **ABSTRACT**

Adillah Alifya Arzam (B 111 12 151). Overview of International Law Against Child Arrangement as a Child Soldier in Armed Conflict. Supervised by Abdul Maasba Magassing and Maskun.

This research aims to find out how the protection of international law against the recruitment of children as soldiers and how the implementation of international legal regulations on the recruitment of children as soldiers. This research is done by library research method or through literature review.

The results obtained from this study are as follows: (1) Prohibition to recruit children as soldiers has been listed in various International Conventions and UN resolutions such as; The Convention on the Rights of the Child of 1989 and its Additional Protocols of 2000, Geneva Convention IV of 1949 and its Additional Protocols of 1977, UN Security Council Resolution No. 1612 Year 2005, and so on. (2) Conventions and resolutions have been created and issued to prevent and reduce the use of children as soldiers, but in reality not all countries are willing to ratify them into their national legal rules. And not a few countries that even have ratified, still violate the rules.

Based on the results of the study, the writer formulated that each state be assertive in supervising and protecting children against the practice of recruiting children as soldiers and punish the perpetrators. In addition, States parties should be more serious about the application of various international legal conventions that specifically protect children and the interests of children in situations of armed conflict. UN as an international organization, should be able to strictly apply sanctions to countries that violate conventions and resolutions. It takes participation from all countries and the entire international community to realize that in any war (armed conflict) situation the reason, the involvement of children in the military is a crime against humanity.

## ABSTRAK

Adillah Alifya Arzam (B 111 12 151).Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perekrutan Anak Sebagai Tentara (*child soldier*) dalam Konflik Bersenjata.Dibimbing oleh Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. dan Dr. Maskun, S.H., L.L.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum internasional terhadap perekrutan anak sebagai tentara dan bagaimanakah implementasi peraturan hukum internasional terhadap perekrutan anak sebagai tentara.Penelitian ini dilakukan dengan metode *library research* atau melalui kajian pustaka.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Larangan untuk merekrut anak – anak sebagai tentara telah tercantum di berbagai Konvensi Internasional dan resolusi PBB seperti; Konvensi Hak – Hak Anak Tahun 1989 dan Protokol tambahannya Tahun 2000, Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol tambahannya Tahun 1977, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1612 Tahun 2005, dsb. (2) Berbagai konvensi dan resolusi telah dibuat dan dikeluarkan untuk mencegah dan mengurangi penggunaan anak sebagai tentara, namun kenyataannya tidak semua negara bersedia meratifikasinya ke dalam peraturan hukum nasional mereka. Serta tidak sedikit negara yang meskipun telah meratifikasi, tetap saja melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan agar setiap negara bersikap tegas dalam mengawasi dan melindungi anak terhadap praktik perekrutan anak sebagai tentara dan menghukum pelakunya dengan seberat-beratnya.Selain itu negara pihak harus lebih serius terhadap penerapan berbagai konvensi hukum internasional yang khusus melindungi anak dan kepentingan anak dalam situasi konflik bersenjata.PBB sebagai organisasi internasional, hendaknya dapat secara tegas menerapkan sanksi-sanksikepada negara yang melanggar konvensi dan resolusi.Diperlukan partisipasi dari semua negara dan seluruh masyarakat internasional untuk menyadari jika dalam situasi perang (konflik bersenjata) apapun alasannya, keterlibatan anak di dalam militer adalah kejahatan kemanusiaan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga Penulis ucapkan atas kebesaran Allah SWT.yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga Penulis mampu merampungkan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan utama Penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, **H. Asdar Ali, S.H., M.Kn.** dan **Hj. Zamzam Halimbar** yang telah memenuhi segala kebutuhan Penulis, baik kebutuhan jiwa maupun raga. Serta tidak henti-hentinya menyanggupi berbagai keinginan yang diajukan oleh Penulis. Tanpa doa dan dukungan yang diberikan oleh mereka, Penulis tidak akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua adik Penulis yaitu **Meinar Hutami Arzam** dan **Muh.Gayatsal M. Arzam** yang senantiasa menemani Penulis dan menjadi tempat berbagi cerita, tawa, suka, dan duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan rampung tanpa adanya bantuan, baik materiil maupun non-materiil yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.



2. Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H. M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. Wakil Dekan II Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. beserta staf dan jajaran Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. dan Dr. Maskun, S.H., L.L.M.selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran dan pengertiannya dalam memberikan bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan kesehatan kepada bapak – bapak sekalian.
4. Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H., Albert Lokollo, S.H., M.H., Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H., dan Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat lebih baik dari sebelumnya.
5. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku penasehat akademik Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum UNHAS.
6. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum UNHAS, khususnya para tenaga pengajar Hukum Internasional, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman serta menjadi inspirasi bagi Penulis dalam

berbagai hal. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan bapak dan ibu sekalian.

7. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum UNHAS atas bantuannya selama ini kepada Penulis.
8. Nur Inayah Maghfira, Indah Dwi Astuti, Kartini, Nurul Apriliani, Nurul Avirah, Annisa Gayatri, Vhyra Afriwanty, Muhammad Akmal, Andi Rezki Juliarno, dan Nyoman Suarningrat. Selaku teman–teman Penulis selama masa perkuliahan.
9. Nurfitriyanti dan Iselda Nuris, selaku teman–teman Penulis di bagian Hukum Internasional yang tidak henti–hentinya menyemangati dan membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta berbagi ilmu yang bermanfaat.
10. Senoaji, Rio Januara, Haryo Setiaji, Gede Tragya, Muh. Idris, Nurul Fadhilah, Kiky Dewanty, Ade Pratiwi, Emmy Tjiang, Megawati, Nurul Arifah, Andi Izzah, Meyrani, selaku teman–teman ‘hidup’ selama dua bulan pada saat KKN di Galung Maloang, Bacukiki Kota ParePare.

Makassar, 19 Mei 2017

Penulis  
Adillah Alifya Arzam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Internasional Tentang Konflik Bersenjata.....	14
1. Pengertian dan Istilah Hukum Internasional .....	14
2. Sumber – Sumber Hukum Internasional .....	18
3. Pengertian Konflik Bersenjata (Perang) .....	19
B. Tinjauan Umum Anak Dalam Hukum Internasional .....	21
1. Pengertian Anak .....	21
2. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional ..	21



3. Pengertian Tentara Anak.....	24
4. Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis Bahan dan Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Analisis Data .....	32

### **BAB IV PEMBAHASAN**

1. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Perekrutan Anak Sebagai Tentara ( <i>child soldier</i> ) dalam Konflik Bersenjata .....	33
1.1 Mekanisme Internasional Perlindungan Anak .....	44
1.2 Peran UNICEF Mengatasi Tentara Anak .....	46
2. Implementasi Pengaturan Perlindungan Terhadap Tentara Anak ( <i>child soldier</i> ) Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional.....	48

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hubungan internasional pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara yang diadakan oleh negara-negara, baik yang bertetangga maupun antar benua atau negara dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, dan juga antar sesama subjek hukum lainnya yang diakui oleh hukum internasional. Salah satu tujuan negara-negara melakukan hubungan internasional adalah dalam rangka memenuhi nilai-nilai sosial berupa keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.<sup>1</sup>

Seringkali dalam proses pemenuhan nilai-nilai sosial tersebut, interaksi yang terjadi bersifat negatif atau konfliktual. Interaksi konfliktual tersebut jika berlanjut tentunya dapat menimbulkan konflik. Tidak tanggung-tanggung konflik internasional tersebut diwujudkan dengan konflik bersenjata atau perang (*use of force*).

Konflik bersenjata (*armed conflict*) merupakan suatu keadaan yang tidak asing lagi di mata dunia internasional. Hampir di setiap negara mengalami konflik bersenjata.

---

<sup>1</sup><http://www.google.co.id>, mengenai *Hubungan-Internasional : Esensi-dan-Mengapa-Harus-Mempelajarinya.html*, (Diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 10:37 WITA) .

Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri).

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.<sup>2</sup>

Konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban, salah satunya anak-anak. Mereka paling sering menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa mengetahui arti dan sebab meletusnya perang itu sendiri. Konflik bersenjata, bukan arena dan domain bagi anak-anak. Akibatnya, perang pasti menjadi kekerasan untuk setiap hak dari setiap anak. *War violates every right of a child- the right to life, the right to be with family and community, the right to health, the right to development of the personality, and the right to be nurtured and protected* (Perang selalu mengorbankan seluruh hak anak-anak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk sehat,

---

<sup>2</sup>Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter* Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, hlm: 51. (Diakses pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 9:12 WITA)



hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi).

Dalam beberapa wilayah yang sedang berkonflik, selain menjadi korban anak juga seringkali menjadi “pelaku” dari perang itu sendiri. Antara lain dengan perekrutan anak-anak untuk menjadi bagian angkatan bersenjata oleh pihak pemerintah atau oleh pihak non-pemerintah (*belligerent*). Hal ini dikenal dengan istilah tentara anak (*child soldier*).

Penggunaan tentara anak mencakup 3 (tiga) bentuk yang berbeda, yaitu: 1) anak dapat mengambil bagian langsung sebagai tentara anak, 2) mereka dapat digunakan dalam peran pendukung seperti kuli, mata-mata atau utusan, 3) mereka dapat digunakan untuk keuntungan politik sebagai perisai manusia. Sepanjang sejarah, anak-anak telah banyak terlibat dalam gerakan militer bahkan ketika praktik semacam itu melawan norma budaya. Sejak tahun 1970-an, sejumlah konvensi internasional yang berlaku mencoba untuk membatasi partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata.

Pada Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan pada tahun 1977 menetapkan 15 tahun sebagai batasan umur minimum untuk tergabung dalam konflik senjata. Walau banyak perdebatan mengenai batasan umur yang dianggap sebagai standar kedewasaan, hampir 80% konflik melibatkan anak-anak di bawah umur 15 tahun, bahkan tidak sedikit masih berumur tujuh atau delapan tahun.

Menurut sejarahnya, munculnya anak-anak sebagai tentara anak danterlibat dalam konflik bersenjata dimulai sekitar abad ke 18. Anak-anak secara tidak langsung telah turut serta dalam konflik bersenjata. Pada waktu itu anak-anaknya dianggap sebagai penggembira saja yakni sebagai penabuh genderang perang, kemudian berkembang menuju sesuatu yang tidak baik dengan mulai merekrut anak-anak untuk menjadi sebuah angkatan perang.

Peristiwa ini telah disebutkan dalam sejarah dan sesuai dengan kebudayaan beberapa warga masyarakat dunia, anak-anak telah diikutsertakanterlibat dalam kampanye militer meskipun terkadang hal-hal yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai dengan etika moral.<sup>3</sup>

Penggunaan tentara anak disebabkan beberapa alasan. Anak-anak dapat menunjukkan peran tentara yang lebih efisien daripada orang dewasa, semangat yang tinggi, dapat memainkan peran ganda sebagai kombatan dan sebagai pengantar barang atau pesan, tidak mudah dikenali, musuh para teroris tidak pernah menyangka, anak-anak akan melakukan kejahatan sesadis dan sebrutal itu sehingga lengah dalam mengantisipasi, dan yang paling menguntungkan adalah bahwa pola pikir anak-anak lebih mudah dimanipulasi dan anak-anak lebih patuh dibandingkan dengan tentara dewasa.

---

<sup>3</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Military\\_use\\_of\\_children](http://en.wikipedia.org/wiki/Military_use_of_children), *Military use children*. (Diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 10:40 WITA).

Sampai saat ini ada 250.000 anak yang dijadikan tentara dan 40% adalah anak perempuan.<sup>4</sup> Menurut laporan dari PBB pada Februari 2008, sebanyak 58 kelompok dari 13 negara masih merekrut dan menggunakan tentara anak. Adapun negara-negara yang dimaksud adalah mulai dari kawasan Timur Tengah, seperti; Afghanistan, Irak, dan lain-lain, Afrika; Kongo, Sudan, Somalia, Uganda, Sierra Leone, dan lain-lain, serta Asia; Myanmar, Sri Lanka, India, Filipina, dan lain-lain.

Kelompok fraksi militer bersenjata baik yang berkuasa maupun kelompok fraksi oposisi bersenjata memasukkan anak-anak dalam barisan tentara mereka. Beberapa dari anak-anak ini bergabung dengan militer dengan pilihan karena mereka percaya bahwa dengan memerangi, mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka, menyelamatkan keluarga mereka, atau karena mereka putus asa bagaimana cara mendapatkan makanan dan penampungan.<sup>5</sup>

Bentuk dari perekrutan tentara anak dapat dilihat dari kasus yang terjadi di negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo (RDK). Negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang menggunakan tentara anak dalam peperangan maupun konflik-konflik internalnya. UNICEF mencatat sekitar 30.000 anak-anak ikut bertempur atau hidup sebagai bagian dari tentara ataupun kelompok

---

<sup>4</sup><https://www.warchild.org.uk/issues/child-soldiers>. (Diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 11:01 WITA).

<sup>5</sup>[http://www.unicef.org/protection/index\\_armedconflict.html](http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html), UNICEF. 2011. *Child Protection from Violence Exploitation and Abuse*. (Diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 11:11 WITA).



milisi. Sekitar 30 – 40% yang terlibat dalam kelompok atau tentara bersenjata RDK ialah berjenis kelamin perempuan.<sup>6</sup>Di Sudan Selatan, ada lebih 11.000 anak yang tercatat sebagai tentara di kedua sisi antara pemerintah dan pemberontak. Polisi militer masuk ke setiap sekolah untuk mengambil beberapa anak dan dijadikan tentara.

Salah satu modus operandi Pol Pot semasa *killing field* di Kamboja telah melibatkan anak dalam aksi teror yang sulit diterima akal sehat. Ratusan anak usia 12-14 tahun merusak, menganiaya, bahkan pembunuhan massal mengakibatkan sekitar 2 juta jiwa melayang selama 17 April 1975 hingga 7 Januari 1979.

Hal yang sama dilakukan Samuel Hinga Norman dan Thomas Lubanga Dyilo yang merekrut anak sebagai tentara. Norman diadili di pengadilan khusus Sierra Leone. Namun, sebelum diputus pengadilan, ia meninggal dunia. Sementara Lubanga adalah orang pertama yang kini diadili di Mahkamah Pidana Internasional atas kasus pelibatan anak sebagai tentara milisi yang aktif melakukan pembunuhan dalam pertikaian antarsuku Hema dan Lendu di Provinsi Ituri, Kongo.

Dalam dua puluh tahun terakhir di Uganda, 30.000 anak diculik untuk dijadikan pejuang untuk memerangi angkatan pertahanan pemerintah. Pada kasus terbaru di negara-negara lain perekrut tentara anak, mereka mau bergabung karena diberi imbalan uang atau

---

<sup>6</sup>[www.wawker.com/2014/12/10-negara-perekrut-tentara-anak-di-dunia](http://www.wawker.com/2014/12/10-negara-perekrut-tentara-anak-di-dunia). (Diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 11:30 WITA).

memiliki hubungan keluarga dengan gerilyawan. Ada juga orang tua yang menyerahkan anaknya pada gerilyawan karena keluarganya tidak mampu menghidupi anak tersebut.<sup>7</sup>

Kondisi ini harus dibayar mahal oleh anak-anak. Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah mengakibatkan runtuhnya penegakkan hak-hak anak yang berada di wilayah konflik tersebut. Anak-anak yang dimobilisasi sebagai tentara telah kehilangan hak-hak azasnya atas hidup, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain. Selain itu yang lebih memprihatinkan, tentara anak juga beresiko tertular AIDS dan kehamilan usia dini akibat menjadi budak seksual. Mereka juga kerap mengalami penyiksaan dan indoktrinasi oleh para kelompok bersenjata.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan status hukum tentara anak adalah status anak yang dijadikan tentara pada saat berlangsungnya konflik bersenjata. Status tentara anak tersebut apakah digolongkan sebagai kombatan yang boleh ditembak atau penduduk sipil (*civilian*) yang tidak boleh ditembak ketika berhadapan dengan musuh.

Pada faktanya, anak-anak yang dijadikan tentara tersebut telah mengangkat senjata dan telah memenuhi syarat sebagai *armed force*,

---

<sup>7</sup><https://www.warchild.org.uk/issues/child-soldiers>. (Diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 11:11 WITA).

yaitu: adanya organisasi, adanya disiplin, dan adanya komando yang bertanggung jawab atas ditaatinya ketentuan hukum perang.<sup>8</sup>

Penggolongan anak-anak yang dilibatkan dalam konflik bersenjata termasuk sebagai kombatan didasarkan pada Pasal 43 ayat (2) Protokol Tambahan II Tahun 1977 yang menyebutkan bahwa pihak yang termasuk dalam angkatan bersenjata adalah mereka yang memiliki hak untuk berperang secara langsung dalam permusuhan, yang terdiri atas: *organized armed forces* (angkatan bersenjata yang terorganisasi), dan kelompok-kelompok atau unit-unit dengan ketentuan bahwa kelompok atau unit tersebut tunduk kepada suatu disiplin internal yang berisikan antara lain pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata.

Tentara anak merupakan bentuk terburuk dari perbudakan modern. Bahkan Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa tentara anak adalah perbuatan merusak dan terhina.<sup>9</sup> Tentara anak bukanlah masalah yang sepele, melainkan masalah serius yang harus jadi perhatian pemimpin-pemimpin negara di dunia. Tentara anak adalah tindakan *illegal* dan *immoral*.

Sampai saat ini perekrutan anak untuk menjadi tentara masih terus dilakukan tanpa adanya perhatian dan tindakan keras oleh dunia

---

<sup>8</sup>[daniputralaw.blogspot.co.id/2015/06/kasus-penggunaan-tentara-anak-di-sierra.html?m=1](http://daniputralaw.blogspot.co.id/2015/06/kasus-penggunaan-tentara-anak-di-sierra.html?m=1). (Diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 13:10 WITA).

<sup>9</sup>Child Soldiers Global Report 2004 diakses dari [www.child-soldiers.org](http://www.child-soldiers.org) hlm: 13. (Diakses tanggal 4 November 2015 pukul 11:20 WITA ).

internasional. Hal ini tentu melanggar ketentuan hukum internasional serta mengindikasikan bahwa perlindungan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 belum terlaksana dengan baik, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme perlindungan bagi anak dalam konflik bersenjata dengan cara-cara damai sesuai dengan yang diakui hukum internasional dalam rangka menghindari akibat-akibat dari terjadinya konflik bersenjata terutama perlindungan terhadap penduduk sipil dalam hal ini anak-anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum internasional terhadap perekrutan anak sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimanakah implementasi pengaturan perlindungan terhadap tentara anak ditinjau dari perspektif hukum internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum internasional terhadap perekrutan anak sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata.
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan perlindungan tentara anak ditinjau dari perspektif hukum internasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis.**

Manfaat akademis yaitu memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional atau hukum humaniter internasional, serta memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan atau pengetahuan di bidang hukum internasional atau hukum humaniter internasional.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Manfaat praktis yaitu sebagai sarana penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman di bidang penelitian hukum, yang merupakan bentuk pelatihan dan pembelajaran terhadap penerapan teori yang telah dipelajari.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Hukum Internasional Tentang Konflik Bersenjata

##### 1.1. Pengertian dan Istilah Hukum Internasional

Semenjak zaman Romawi dahulu kala telah ada suatu jenis hukum yang kini disebut dengan hukum internasional. Adapun istilah tertua dalam penyebutan hukum internasional adalah "*ius gentium*". *Ius gentium* digunakan untuk menyatakan dua pengertian yang berlainan, yaitu:

- 1) *Ius Gentium*: hukum yang mengatur hubungan antara warga kota Roma dengan orang asing yakni orang yang bukan warga kota Roma.
- 2) *Ius Gentium*: hukum yang diturunkan dari hukum alam yang mengatur masyarakat segala bangsa. Jadi hukum yang diadakan untuk mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka dinamakan "hukum antar negara" atau "hukum internasional" (*law of nations*).

Istilah *ius gentium* kemudian berkembang menjadi *ius entergentes*. Artinya, hukum yang berlaku antar masyarakat atau hukum antar bangsa. *Ius gentium* atau *ius gentes* kemudian diterjemahkan menjadi *volkerrecht* dalam bahasa Jerman, *droit degens* dalam bahasa Perancis, dan *law of nations (international law)* dalam bahasa Inggris.

Hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional yang sederajat. Masyarakat internasional terdiri atas negara-negara yang merdeka, sederajat dan berdaulat. Hal ini berarti tiap negara berdiri sendiri dan tidak dibawah kekuasaan negara lain.

Hukum internasional pada dasarnya dibuat untuk mencegah timbulnya perang atau dengan kata lain untuk mengatur hubungan-hubungan antara negara, sehingga dapat menjamin ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat internasional. Harus disadari sebenarnya banyak sarjana yang mengemukakan pengertian atau batasan tentang hukum internasional. Akan tetapi perlu disadari terlebih dahulu bahwa batasan atau pengertian tentang hukum internasional dari sarjana yang satu tidak persis sama dengan batasan atau pengertian yang lainnya. Meskipun demikian dari pengertian atau batasan yang berbeda-beda itu dapat ditarik perbedaan dan persamaan.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Batas-batas tersebut meliputi antarnegara dan negara dengan subjek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacipta, Jakarta : 1982, cetakan keempat, hlm: 3.



Sedangkan menurut J.L. Brierly, Hukum Internasional sebagai kumpulan aturan atau asas untuk berbuat sesuatu yang mengikat negara–negara di dalam hubungan mereka dengan yang lainnya.<sup>11</sup> Sugeng Istanto menambahkan, bahwa hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, pengertian hukum internasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Hukum internasional adalah seperangkat kaidah dan prinsip tindakan ataupun tingkah laku yang mengikat negara, yang berupa sistem hukum.
- Konsekuensi dari adanya hubungan internasional adalah munculnya hukum internasional. Hubungan internasional yang telah dipraktikkan oleh negara-negara di dunia telah melahirkan hak dan kewajiban antarsubjek hukum (negara).
- Subjek hukum internasional sebagai pelaku terdiri atas negara dan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara, dan
- Ruang lingkup hukum internasional, meliputi hubungan antar negara dan negara, hubungan antar subjek hukum bukan negara dan subjek hukum bukan negara lainnya.

Istilah hukum internasional terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>11</sup> J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Damai Internasional*, Bhratara, Jakarta : 2003, hlm: 3.

<sup>12</sup> P Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta : 2009, hlm: 4.

### 1. Hukum Perdata Internasional

Merupakan hukum internasional yang mengatur hubungan antara hukum dan warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain. Hukum perdata internasional juga disebut hukum antar bangsa.

### 2. Hukum Publik Internasional

Merupakan hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya dalam hubungan internasional. Hukum publik internasional juga disebut hukum antarnegara.

### 3. Hukum Transnasional

Istilah ini digunakan oleh para pakar yang tidak setuju dengan pembagian hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Adalah tidak mudah menurut mereka memberikan yang tegas antara hukum yang punya karakteristik perdata dan hukum yang punya karakteristik publik. Sebagai contoh, sebuah perwakilan asing menyewa rumah milik penduduk setempat untuk kantor atau kediaman duta besarnya. Akan dikategorikan ke perdata atau publikkah kasus ini? Keduanya mengandung unsur perdata maupun publik. Istilah transnasional karenanya sangat tepat menurut pendukung istilah ini yaitu prinsip-prinsip dan kaidah yang

mengatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum dan bersifat lintas negara.<sup>13</sup>

## **1.2. Sumber-sumber Hukum Internasional**

Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu; sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari bentuknya, sedangkan sumber hukum materiil adalah segala sesuatu yang menentukan isi dari hukum.

Sumber hukum formil berdasarkan pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional terdiri atas:

- 1) Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui oleh negara-negara.
- 2) Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
- 3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- 4) Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacipta, Jakarta : 1982, cetakan keempat, hlm: 9.

Sumber hukum materiil merujuk pada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam kasus tertentu. Dari sebuah hukum materiil inilah isi dari sebuah hukum bias ditemukan. Dengan kata lain, sumber hukum materiil memberikan isi dari hukum sedangkan sumber hukum formil memberikan kewenangan dan validitas pemberlakuannya.

### **1.3. Pengertian Konflik Bersenjata (Perang)**

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik, yang dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan. Dalam studi hubungan Internasional, perang adalah penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang dapat terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan mereka bisa tercapai, kecuali dengan cara kekerasan.<sup>15</sup> Perang juga merupakan suatu bentuk hubungan yang hampir sama tuanya dengan peradaban manusia di muka bumi. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa sebagian besar sejarah manusia diwarnai dengan peperangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Graham Evans and Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London: Penguin Books, 1998, page: 565 dalam Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm: 2.

<sup>16</sup> Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif* (Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta : 1997), hlm: 3. Diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:29 WITA.

Beberapa definisi perang menurut para ahli:

a. Quincy Wright:

Perang adalah keadaan hukum yang secara seimbang memperbolehkan dua kelompok atau lebih yang saling bermusuhan melakukan suatu konflik dengan didukung oleh kekuatan senjata.<sup>17</sup>

b. Francois:

Perang adalah keadaan hukum antara negara-negara yang saling bertikai dengan menggunakan kekuatan militer.<sup>18</sup>

c. Oppenheim:

Perang adalah persengketaan antara dua negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang.<sup>19</sup>

Perang dan konflik bersenjata pasti akan selalu hadir sebagai akibat pertentangan negara dengan negara, rakyat dengan negara ataupun rakyat dengan rakyat sendiri. Karena itulah, hukum humaniter dibentuk yang bertujuan untuk memanusiawikan perang dan konflik bersenjata. Keberadaan hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk meniadakan peperangan ataupun konflik bersenjata yang terjadi di banyak negara. Melainkan, ingin memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>17</sup> [yustinusmf.blogspot.co.id/2012/04/konflik-dan-perang.html?m=1](http://yustinusmf.blogspot.co.id/2012/04/konflik-dan-perang.html?m=1) (Diakses pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 11:52 WITA)

<sup>18</sup> KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005, hlm: 4.

<sup>19</sup> Ibid.

kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*)serta menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh.

## **2. Tinjauan Umum Anak dalam Hukum Internasional**

### **2.1. Pengertian Anak**

Menurut Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* yang telah disetujui majelis umum PBB definisi anak adalah: “setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali jika di bawah UU (*Undang-Undang*) atau hukum nasional yang berlaku bagi anak, mayoritas usia lebih dini diperoleh lebih awal.”

Indonesia yang juga meratifikasi Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mencantumkan definisi anak dalam Pasal 1, yaitu: “anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

### **2.2. Perlindungan Anak dalam Perpektif Hukum Internasional**

Ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam berbagai sistem hukum internasional maupun nasional. *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan dasar untuk semua standar HI hak-hak anak. Akan tetapi, konvensi PBB tentang

hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1958 adalah instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial anak.

Gagasan mengenai konvensi PBB tentang hak-hak anak timbul saat berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan akibat dari bencana peperangan, terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. PBB membentuk konvensi tentang hak-hak anak setelah melihat banyaknya anak yang mendapat perilaku tidak sesuai dan disetarakan dengan orang dewasa.

Awal bergerak ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang diwakili oleh Eglantyne Jebb<sup>20</sup> yang kemudian merancang Deklarasi Hak Anak untuk *Save the Children Union*:

- a) Anak harus diberikan sarana yang memadai untuk perkembangan, baik material maupun spiritual;
- b) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang terbelakang harus dibantu, anak yang nakal harus direklamasikan, dan anak yatim harus ditolong dan terlindungi;
- c) Anak harus menjadi prioritas utama untuk menerima bantuan pada saat kesulitan;
- d) Anak harus berada dalam posisi untuk memperoleh penghasilan dan harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi;

---

<sup>20</sup>Eglantyne Jebb merupakan pendiri *Save the Children*, organisasi independen yang mengutamakan pembentukan dan perubahan yang berkelanjutan kepada anak yang membutuhkan.



- e) Anak harus dibesarkan dalam kesadaran bahwa kemampuan yang dimiliki digunakan untuk membantu sesama manusia.<sup>21</sup>

Kemudian pada tahun 1924, untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1989, rancangan *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak, selanjutnya ditulis CRC) diselesaikan dan pada tahun itu juga, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Tanggal 2 September 1990, CRC mulai diberlakukan sebagai hukum internasional.

Dalam CRC terdapat di dalamnya 54 artikel dan dua protokol opsional, yang secara umum tergambar adalah:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan;
- c) Hak untuk terhindar dari pengaruh berbahaya;
- d) Hak untuk terhindar dari pelecehan;
- e) Hak untuk terhindar dari eksploitasi;
- f) Hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga;
- g) Hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

---

<sup>21</sup> [www.savethechildren.net](http://www.savethechildren.net), *History of Save The Children*, (Diakses pada tanggal 6 November 2015 pukul 21:15 WITA).

Empat prinsip dasar dari CRC ini adalah:

1. *Non Discrimination*: artinya semua hak yang terkandung dan diakui dalam CRC (*Convention on the Rights of Child*) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM;
2. *Best Interest of The Child*: artinya semua tindakan yang menyangkut anak, yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama;
3. *Survival and Development*: artinya bahwa hak hidup yang melekat pada setiap anak harus diakui dan bahwa Hak Anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip *indivisibility* HAM;
4. *Respect for The Views of The Child*: artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>22</sup>

### **2.3. Pengertian Tentara Anak**

UNICEF mendefinisikan tentara anak adalah setiap anak di bawah usia 18 tahun, yang merupakan bagian dari setiap bentuk

---

<sup>22</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Seri bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara X : Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesia. 2005, hlm: 1.

kekuatan bersenjata reguler atau kelompok bersenjata dalam bentuk apapun. Pengertian lebih detail dijelaskan dalam *Cape Town Principles*.<sup>23</sup> Definisi tentara anak: *“A child soldier is any person under 18 years of age who is part of any kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity, including but not limited to cooks, messengers, porters and anyone accompanying such group, other than family members. The definition includes girls recruited for sexual purposes and for forced marriage. It does not, therefore, only refer to a child who is carrying or has carried arms”*. (Tentara anak adalah setiap orang yang usianya berada di bawah 18 tahun yang merupakan bagian dari setiap bentuk kekuatan senjata reguler atau tidak teratur atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, termasuk diberdayakan sebagai koki, porter, utusan, dan siapapun yang menyertai kelompok tersebut selain anggota keluarga. Definisi tentara anak juga mencakup anak perempuan yang direkrut untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa. Bagaimanapun, prinsip ini tidak berlaku hanya pada anak-anak yang menggunakan senjata).

#### **2.4. Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata**

Sejak akhir tahun 1980-an, bersamaan dengan berakhirnya perang dingin dan pengembangan perang baru, perekrutan tentara

---

<sup>23</sup>CTP dibentuk UNICEF pada 27-30 April 1997 di Cape Town AfSel. Prinsip ini juga disebut *“Cape Town and Best Practices on the Recruitment of Children into the Armed Forces and on Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa”*

anak merupakan suatu fenomena global yang baru. Sebelum diberdayakan langsung sebagai tentara, anak-anak sebelumnya dikenalkan terlebih dahulu dengan dunia perang sebagai koki, porter, pengangkut amunisi, *minesweepers* (penyapu ranjau), mata-mata dan *sexual slaves* (budak seksual). Beberapa nilai lebih (dalam konotasi negatif) penggunaan anak sebagai tentara perang:

- a. Tenaga anak dipandang lebih murah;
- b. Lebih mudah untuk dikorbankan (*expendable*);
- c. Lebih mudah menerima doktrin dan cuci otak (*brainwashing*);
- d. Loyalitas tinggi;
- e. Tidak berfikir panjang dalam melaksanakan suatu tugas (*unthinking obedience*).

Padahal anak-anak termasuk kelompok khusus yang mendapatkan perlindungan Hukum Humaniter Internasional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi *Inter-Parlamentary Union* ke-50 pada bulan September 1993, sebagai berikut: "Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh ikut ambil bagian secara aktif dalam permusuhan dan tidak boleh direkrut dalam angkatan bersenjata. Tetapi jika anak-anak ikut dalam pertempuran dan tertangkap, mereka harus mendapatkan perlindungan khusus. Mereka tidak mendapatkan hukuman untuk pelanggaran hukum dalam sengketa bersenjata yang telah dilakukannya jika mereka berusia di bawah 18 tahun."

Perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata juga bertentangan dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang dapat ditetapkan terhadap pelaku kejahatan perang (*war crime*) berdasarkan Statuta Roma Pasal 8 Ayat 2 (b) xxvi: “Memperkerjakan atau melibatkan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam wajib dinas militer atau menggunakan mereka secara aktif untuk ikut serta dalam konflik bersenjata.”

Berdasarkan laporan dari *Child Soldiers Global Report 2008* diperkirakan kurang lebih delapan belas negara melakukan perekrutan tentara anak, seperti yang tertera dalam tabel berikut: <sup>24</sup>

NEGARA	TENTARA ANAK DALAM ORGANISASI RESMI PEMERINTAH	TENTARA ANAK DALAM KELOMPOK PARAMILITER
Burundi	X	
Chad	X	X
Filipina		X
India	X	X
Iran		X
Israel	X	
Kolumbia	X	X
Kongo	X	X
Libya		X
Myanmar	X	X
Nepal	X	
Pantai Gading		X
Peru		X
Somalia	X	
Sudan	X	X
Uganda	X	X
Yaman	X	
Zimbabwe		X

<sup>24</sup><http://www.childsoldiersglobalreport.org>. Retrieved on 3 April 2010. (Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 11.00 WITA)

Berikut beberapa contoh kasus perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata:

1) Afganistan:

Pada saat perang berlangsung yang dimulai sejak 7 Oktober 2001, anak-anak berusia di bawah 18 tahun direkrut ke angkatan bersenjata bahkan ditugaskan sebagai pelaku bom bunuh diri. Bahkan di sekolah-sekolah informal menjadi pusat doktrinisasi dan perekrutan pejuang-pejuang muda.<sup>25</sup>

2) Myanmar:

Perang saudara yang terjadi sejak tahun 1948, menyebabkan banyak etnis yang berbeda dan masing-masing bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Tentara anak di Myanmar direkrut dengan cara menawan anak laki-laki di stasiun kereta api, terminal bus, pasar, serta tempat umum lain, lalu kemudian mereka diancam akan dipenjara apabila menolak bergabung. Hingga tahun 2013, pemerintah militer disana disinyalir memiliki kurang lebih 400.000 tentara anak.<sup>26</sup>

3) Kolombia:

Sejak tahun 1964 hingga saat ini perang sipil di Kolombia masih berlangsung sehingga perekrutan anak sebagai tentara tidak dapat dihindarkan, sampai pada tahun 2006 lebih dari 14.000

---

<sup>25</sup> UNICEF, *Rapid Assessment on the Situation of Child Soldiers in Afghanistan*, July 2003, cited in *Child Soldier : Global Report 2004*. (Diakses pada tanggal 6 November 2015 pukul 21:31 WITA).

<sup>26</sup> [www.wawker.com/2014/12/10-negara-perekrut-tentara-anak-di-dunia](http://www.wawker.com/2014/12/10-negara-perekrut-tentara-anak-di-dunia). (Diakses pada tanggal 6 November 2015 pukul 21:31 WITA).

anak yang rata-rata berumur 12 tahun baik laki-laki maupun perempuan diberi pendidikan paramiliter. Mereka bertugas menjadi informan pergerakan pasukan pemerintah, mengikuti perang frontal melawan pasukan pemerintah bahkan membakar desa.<sup>27</sup>

4) Sierra Leone:

Ribuan anak-anak direkrut dan digunakan oleh semua pihak baik itu pemerintah maupun pemberontak selama konflik di Sierra Leone (1993-2002) kebanyakan mereka diberi obat dan digunakan untuk melakukan kekejaman.<sup>28</sup>

5) Turki:

Sejak akhir tahun 1970-an, organisasi pemberontak di Turki didirikan atas nama *The Kurdistan Worker's Party*. Organisasi ini tidak pernah menetap lama di suatu tempat sehingga tidak terhitung lagi berapa banyak anak-anak yang direkrut selama organisasi ini berdiri. Anak-anak tersebut dilatih untuk menggunakan senjata dan bahan peledak.

6) Somalia:

Perang etnis, agama dan sipil telah terjadi sejak tahun 1988. Selama perang banyak kelompok tertentu menculik anak-anak

---

<sup>27</sup> [wikipedia.org/Revolutionary Armed Forces of Columbia](http://wikipedia.org/Revolutionary_Armed_Forces_of_Columbia). (Diakses pada tanggal 6 November 2016 pukul 21:31 WITA).

<sup>28</sup> [daniputralaw.blogspot.co.id/2015/06/kasus-penggunaan tentara-anak-di-sierra.html?m=1](http://daniputralaw.blogspot.co.id/2015/06/kasus-penggunaan-tentara-anak-di-sierra.html?m=1). (Diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 13:42 WITA).



dan mencuci otak mereka, adapula anak-anak yang dibayar secara bulanan untuk maju kedalam medan perang.<sup>29</sup>

Di saat yang sama, tidak sedikit pula negara seperti, Argentina, Bolivia, China, dan Korea Utara yang menjadikan militer sebagai salah satu bagian dari pendidikan di sekolah, dimana anak – anak dapat ikut bergabung dalam proses latihan fisik dasar dan ikut serta dalam kegiatan upacara (latihan baris berbaris). Sedangkan di negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, anak – anak yang telah berusia 17 tahun ke atas dapat bergabung ke dalam angkatan militer atas izin dari orang tua mereka.

---

<sup>29</sup><http://www.wawker.com/2014/12/10-negara-perekrut-tentara-anak-di.html>. (Diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 13:47 WITA).

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan proposal ini, penelitian dilakukan di dua tempat yaitu:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Perpustakaan Pusat Nasional Republik Indonesia.

### **B. Jenis Bahan dan Sumber Data**

#### **1. Jenis bahan**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, publikasi resmi dari PBB, bahan-bahan dokumentasi, dan data-data lain yang diperoleh secara langsung maupun yang diperoleh dari hasil pencarian melalui internet yang terkait dengan Hukum Internasional terhadap perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata.

#### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan adalah buku-buku, literatur-literatur lain seperti karya ilmiah serta informasi dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, literatur, karya ilmiah jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

### **D. Analisis Data**

Penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur lain seperti karya ilmiah serta informasi dari internet. Data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang hasil penelitian yang jelas dan terang

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Perekrutan Anak Sebagai Tentara (*child soldier*) dalam Konflik Bersenjata.**

Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai Organisasi Internasional mempunyai tujuan dan tugas yang besar dan luas, khususnya di bidang perlindungan hak-hak anak. Sehingga apabila ditelusuri lebih jauh perjuangan melindungi hak-hak anak merupakan lanjutan dari perjuangan sejarah kemanusiaan sendiri yang hati nuraninya tidak dapat menerima manusia lain dikurangi hak azasi, terlebih lagi diperlakukan sebagai obyek yang tidak mempunyai hak-hak apapun.

Usaha tersebut kemudian berkembang lebih konkrit dan efektif baik melalui lembaga PBB sendiri, maupun hubungan kerjasama PBB dengan lembaga-lembaga lain diluar PBB. Semua itu bertujuan untuk mempromosikan hak-hak anak kepada seluruh dunia.

Praktek penggunaan anak di bawah umur dalam kelompok militer menarik perhatian PBB. PBB yang diwakili UNICEF membuat program-program untuk menghentikan dan mencegah praktek perekrutan yang masih terus terjadi hingga saat ini. UNICEF adalah pelopor dalam perlindungan anak dari perekrutan sebuah instansi militer, penculikan anak dan penolakan akses kemanusiaan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>[https://www.unicef.org/media/media\\_27787.html](https://www.unicef.org/media/media_27787.html) diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 07:47 WITA

UNICEF merupakan organisasi internasional yang diberikan mandat oleh komunitas internasional untuk melindungi hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi anak.

Anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional sejak tahun 1924 ketika Deklarasi tentang Hak-Hak Anak Internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Instrumen-instrumen hak asasi manusia selanjutnya dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti; Deklarasi Universal Hak-hak Dasar Manusia tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*) dan instrumen regional seperti Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia (*America Declaration of the Rights and Duties of Man*) yang dibuat pada tahun yang sama mengakui bahwa hak manusia untuk terbebas dari kekerasan dan eksploitasi. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang termasuk anak-anak. Dan dikembangkan lebih jauh dalam Konvensi Hak-Hak Politik dan Hak-Hak Sipil tahun 1966 (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Masyarakat internasional merasa perlunya suatu instrumen baru yang secara khusus membahas hak-hak anak, sehingga pada tahun 1989 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on the Rights of the Child*) diadopsi oleh Sidang Majelis Umum. Konvensi ini

dengan cepat menjadi perjanjian hak-hak azasi manusia yang paling banyak diratifikasi secara universal. Sampai saat ini, tercatat 195 negara telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.<sup>31</sup> Konvensi ini juga meningkatkan hak-hak anak dalam standar internasional.

Konvensi ini dengan jelas mengatur tentang partisipasi anak dalam perang (konflik bersenjata), yaitu:

- 1) Negara-negara anggota tidak boleh merekrut siapapun yang berusia di bawah 15 tahun dalam bagian apapun dalam angkatan bersenjata.
- 2) Sebuah negara yang merekrut orang-orang dari usia 15-18 tahun harus memulai perekrutannya dari mereka yang berusia mendekati 18 tahun.
- 3) Semua negara harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah partisipasi siapapun di bawah usia 15 tahun dalam pertikaian, baik dalam kelompok pemerintah maupun kelompok bersenjata lainnya.

Selanjutnya pasal 32 mengakui hak-hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dilindungi agar tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan atau perkembangan sosial, moral, spiritual dan fisiknya.

---

<sup>31</sup><https://www.google.com/search?q=un+convention+on+the+rights+of+the+child+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (Diakses pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 12.44 WITA)

Untuk memperkuat ketentuan ini, sebuah Protokol Pilihan bagi Konvensi penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*) disahkan pada tahun 2000 dengan upaya untuk memungkinkan seluruh negara membuka komitmen yang lebih besar terhadap perlindungan anak dari keikutsertaan mereka dalam konflik bersenjata dan perekrutan ke dalam angkatan bersenjata. Protokol tersebut mulai berlaku tahun 2002. Protokol ini menegaskan bahwa;

- 1) Negara–negara peserta akan mengambil langkah–langkah untuk menjamin agar para anggota angkatan bersenjata yang belum berusia 18 tahun tidak mengambil bagian secara langsung.
- 2) Negara–negara peserta akan menjamin agar seseorang yang belum berusia 18 tahun tidak mengalami pengerahan wajib dalam angkatan bersenjata.
- 3) Rekrutmen mereka yang berada di bawah usia 18 tahun harus benar-benar bersifat sukarela setelah mereka diberitahu secara menyeluruh tentang tugas yang dilibatkan dan kedinasan militer yang dimaksud serta telah memperoleh persetujuan oleh orang tua/wali sah yang bersangkutan.
- 4) Kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah sama sekali tidak boleh merekrut mereka yang berusia di bawah usia 18 tahun atau menggunakan mereka dalam pertikaian.



- 5) Kepada anak-anak yang telah ikut serta dalam konflik bersenjata, negara-negara anggota harus memberikan rehabilitasi psikologis dan pengembalian ke dalam masyarakat.

Konvensi ini menjelaskan dan secara hukum mengikat hak-hak anak yang dicantumkan dalam instrumen-instrumen sebelumnya. Konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan baru, misalnya; yang berkenaan dengan hak untuk berpartisipasi dan prinsip bahwa dalam semua keputusan yang menyangkut anak, keputusan yang terbaik untuk anak harus diutamakan. Konvensi ini pun untuk pertama kalinya membentuk suatu badan internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi penghormatan atas hak-hak anak yaitu Komite Hak-Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) pada tanggal 27 Februari 1991.

Dalam PBB, Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal telah menempatkan masalah perlindungan anak dalam konflik bersenjata secara tegas dalam agenda keamanan dan perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan no.1261 tahun 1999 dan no. 1314 tahun 2000 membuat rekomendasi bahwa, jika dipandang perlu, seorang penasihat perlindungan anak (*Child Protection Adviser- CPA*) dipekerjakan oleh PBB sebagai bagian operasi penjagaan perdamaian. CPA ini membantu perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB (pimpinan khusus operasi penjagaan perdamaian)

untuk menjamin hak-hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak menjadi prioritas selama proses penjagaan perdamaian dunia.

Penasehat perlindungan anak pertama kali diterjunkan di Republik Demokrasi Kongo pada tahun 1999, kemudian di Sierra Leone pada tahun 2000. Semenjak itu, Unit-unit Perlindungan Anak telah disertakan dalam Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokrasi Kongo dan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sierra Leone. CPA lainnya diterjunkan dan disetujui untuk Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Angola, dan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Pantai Gading dan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Liberia.

Pengakuan hak anak atas perlindungan tidak hanya terbatas pada Konvensi Hak-Hak Anak. Ada sejumlah instrumen, baik instrumen dari PBB maupun badan internasional lainnya yang juga memasukkan hak-hak ini. Diantaranya:

- 1) Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol tambahannya tahun 1977 (*Fourth Geneva Convention and Optional Protocol I relating to the Protection of the Victims of the International Armed Conflict*).

Anak tidak boleh dilibatkan dalam pembentukan organisasi– organisasi yang berada dibawah penguasa pendudukan dan tidak diwajibkan bekerja dalam bentuk apapun. Secara umum, anak–anak berhak atas penghormatan dan perlindungan khusus dari segala bentuk penyerangan yang brutal. Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa, ketika sebuah wilayah dikepung maka penguasa setempat harus

mengupayakan perundingan untuk mengeluarkan anak-anak serta mereka yang terluka, sakit, dan berusia lanjut.

- 2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Pasal 24 Ayat (1) mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

- 3) Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 dan Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 (*ILO Convention Nr. 138: Minimum Age Convention and ILO Convention Nr. 182: Worst Forms of Child Labour*).

Ada dua jenis utama pekerjaan anak: pekerjaan di bawah umur dan pekerjaan berbahaya.<sup>32</sup>Kedua konvensi ini saling melengkapi dalam usaha melarang dan menghapuskan kedua hal tersebut.Salah satu yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk untuk anak adalah pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.<sup>33</sup>Secara umum, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam

---

<sup>32</sup>[https://www.unicef.org/indonesia/id/Fa\\_Isi\\_DPR.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf) (Diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 16:19 WITA)

<sup>33</sup><http://bppmmahkamah.blogspot.co.id/2009/07/hak-anak-dalam-konvensi-ilo-182.html> (Diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 13:16 WITA)

dalam bidang–bidang pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan perkembangan mereka.

- 4) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1261 tahun 1999 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1314 tahun 2000 (*UN Security Council Resolution Nr. 1261 and UN Security Council Resolution Nr. 1314*).

Resolusi ini dengan tegas menolak anak–anak dijadikan target dalam konflik bersenjata, termasuk di dalamnya membunuh atau melukai (membuat cacat), kekerasan seksual, penculikan, perekrutan anak dalam konflik bersenjata yang bertentangan dengan hukum internasional serta penyerangan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum internasional termasuk tempat–tempat umum seperti sekolah dan rumah sakit.

- 5) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1612 tahun 2005 (*UN Security Council Resolution Nr.1612 Children and Armed Conflict Resolution*).

Merupakan norma internasional yang dirumuskan PBB untuk melindungi hak–hak anak, khususnya yang berdampak pada pelanggaran hak anak yaitu perekrutan dan penggunaan anak ke dalam militer. Resolusi ini mengajak negara–negara anggota dan masyarakat internasional untuk ikut melaporkan pelanggaran dan penyalahgunaan hak–hak anak yang terkena dampak konflik bersenjata.

- 6) Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*).

Dalam pasal 8 tentang kejahatan perang bahwa salah satu pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional adalah menetapkan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi dalam pertikaian.

- 7) Piagam Afrika tentang Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak tahun 1999 (*African Charter on the Rights and Welfare of the Child*).

Dalam pasal 22 ditegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya digunakan sebagai tentara maupun berpartisipasi secara langsung dalam perang. Selain itu pada pasal 15–16 turut dijelaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan melakukan pekerjaan yang berisiko bagi fisik, mental, spiritual, moral, serta perkembangan sosialnya.

- 8) Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia tahun 1984 (*American Declaration of the Rights and Duties of Man*)

Pasal 7 mengatakan bahwa semua perempuan dan semua anak-anak berhak atas perlindungan, perawatan, dan bantuan khusus.

- 9) *Cape Town Principles and Best Practices 1997*.

Sebagai usaha untuk mengatasi semakin ekstremnya masalah perekrutan anak dalam konflik bersenjata, Organisasi Non-

Pemerintah (NGO) dan *UNICEF* sepakat menyelenggarakan simposium di Cape Town, Afrika Selatan Pada tanggal 27–30 April 1997. Simposium ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pencegahan perekrutan anak ke dalam angkatan bersenjata, salah satunya dengan menentukan usia minimum seseorang dapat direkrut adalah 18 tahun. Selain itu, sebagai ajakan kepada pemerintah dan masyarakat di negara–negara konflik untuk menghentikan perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata.

10) *Paris Principles and Guidelines on Children Associates with Armed Forces and Armed Groups 2007.*

Merupakan suatu konsep dasar yang membahas tentang permasalahan anak–anak di seluruh dunia mulai dari pengungsi anak – anak, keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata serta upaya yang perlu dilakukan pada saat proses pengembalian anak–anak yang terlibat dalam konflik bersenjata ke orang tua, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal mereka.

11) Protokol Untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia tahun 2000 (*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons*).

Pasal 1 Ayat (1): “Protokol ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional

Terorganisasi. Protokol ini wajib ditafsirkansejalan dengan Konvensi.”

Pasal 3 (a): “Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaankekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan,penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaanpembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorangatau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakanatau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilnorgan-organ.”

Pasal 3 (c): “Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seorang anak dengan tujuan mengeksploitasi wajib dianggap sebagai perdagangan orang meskipun tidak menggunakan cara-cara yang disebutkandalam ayat (a) pasal ini.”

Dari Pasal 3 Ayat (a) dan (c) dapat disimpulkan bahwa tentara anak juga merupakan salah satu kejahatan perdagangan orang, hal ini dapat dilihat dari eksploitasi dalam bentuk kerja atau pelayanan paksa serta perbudakan. Seperti diketahui, banyak kasus dimana

anak-anak direkrut secara paksa untuk bergabung dengan angkatan bersenjata.

Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan di setiap bidang tugas.

Perlindungan anak menciptakan kewajiban atau tugas bagi presiden, perdana menteri, hakim, guru, dokter, tentara, orang tua dan bahkan anak-anak sendiri. Tugas-tugas ini mungkin tercermin dalam standar hukum yang diberlakukan di suatu negara dan pilihan-pilihan yang diambil pemerintah, termasuk dalam alokasi sumber daya yang dimilikinya.

### **1.1. Mekanisme Internasional Perlindungan Anak.**

Salah satu mekanisme internasional yang penting bagi perlindungan anak adalah Komite Hak-hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*), yang terdiri dari 18 anggota yang dipilih oleh negara-negara anggota Konvensi dan yang bertugas dalam kapasitasnya sebagai perorangan. Fungsi utama dari Komite yang bertemu tiga kali dalam setahun itu, adalah menelaah laporan-laporan dari negara-negara anggota yang diminta untuk diserahkan secara berkala.



Laporan itu diharapkan berisi informasi mengenai undang-undang dan berbagai upaya lain yang telah diadopsi oleh negara anggota, yang memberikan pengaruh pada hak-hak yang diakui dalam Konvensi tersebut dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan hak-hak itu. Ketika suatu laporan telah diterima, Komite mengundang pemerintah untuk mengirimkan delegasinya guna mempresentasikan laporan dan menjawab segala pertanyaan yang mungkin diajukan oleh Komite. Anggota komite mungkin juga memberikan komentar mengenai informasi yang termuat dalam laporan, serta informasi relevan lainnya yang diterima dari badan-badan PBB lainnya serta lembaga swadaya masyarakat (NGO). Komite kemudian membuat “observasi simpulan” dan rekomendasi yang sering berkaitan dengan legislasi, termasuk rujukan mengenai celah-celah yang ada dalam legislasi yang sedang berlaku atau ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap oleh Komite tidak cocok dengan Konvensi tersebut.

Ada sejumlah mekanisme lain yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Secara fundamental, anak menikmati hak-hak azasi manusia dan oleh karena itu, semua mekanisme hak-hak azasi manusia di tingkat internasional dan regional harus memberikan perlindungan bagi mereka. Harus diingat bahwa hal yang sama berlaku di tingkat nasional, dimana mekanisme perlindungan hak-hak azasi manusia seperti mahkamah konstitusi (*constitutional courts*) juga

harus menjamin bahwa mereka menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

## **1.2. Peran UNICEF Dalam Mengatasi Tentara Anak.**

UNICEF menaruh perhatian yang besar dalam penyelesaian tentara anak. UNICEF bersama dengan organisasi internasional lainnya seperti; *United Nation Development Program* (UNDP), *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), *United Nations Population Fund* (UNFPA), *World Food Programme* (WFP), *International Labour Organization* (ILO), dan *United Nations Education, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) melakukan koordinasi agar ada kesinambungan tugas demi penyelesaian dan penghentian rekrutmen tentara anak. Dan melakukan pembebasan anak dari tentara dan mengembalikan mereka kepada keluarga dan komunitasnya sehingga mereka dapat melakukan aktivitas seperti anak pada umumnya. Karena aktivitas militer yang melibatkan anak di bawah umur merupakan pelanggaran HAM berat termasuk penculikan, kekerasan, dan pelecehan yang terjadi di dalamnya.

Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki tanggung jawab besar tidak hanya memonitor permasalahan tentara anak tetapi juga untuk menyelesaikan kemudian mencegah kembali perekrutan tentara anak di berbagai negara. Upaya UNICEF dalam masalah

tentara anak menentukan prospek kehidupan yang bersifat humanis dan manusiawi bagi anak di bawah umur.

Dilihat dari tujuannya, UNICEF memiliki tujuan yang besar yakni mereformasi standar kualitas hidup anak-anak khususnya di negara-negara berkembang sesuai dengan isi yang tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989. UNICEF juga memiliki otoritas yang bersifat persuasif untuk secara mendasar mempengaruhi formulasi kebijakan atau keputusan pemerintah suatu negara. Selain permasalahan anak, tujuan UNICEF lainnya yang memiliki kesinambungan secara kuat terhadap kehidupan anak-anak adalah bekerja menangani masalah kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi.<sup>34</sup>

Dalam menjalankan perannya, UNICEF merekomendasikan bahkan mengikat negara anggotanya untuk melakukan tindakan atau mereformulasi kebijakan yang sesuai dan sejalan dengan tujuan UNICEF itu sendiri melalui peraturan-peraturan yang mengikat. Mekanisme yang biasanya dilakukan adalah melalui pembentukan resolusi, yakni permasalahan tentara anak.

Upaya UNICEF tidak terbatas pada pembebasan dan penghentian perekrutan tentara anak saja, tetapi secara lebih jauh upaya UNICEF juga dibutuhkan dalam proses reintegrasi anak-anak tersebut dan pemulihan keadaan kehidupan mereka sebagai anak-

---

<sup>34</sup>[https://www.unicef.org/about/who/index\\_introduc](https://www.unicef.org/about/who/index_introduc) diakses pada tanggal 4 April 2017 Pukul 10:37 WITA

anak pada umumnya. Pasca pembebasan tentara anak, langkah UNICEF selanjutnya adalah melakukan pemulihan psikologis dengan cara memberikan konseling. Selain itu, UNICEF juga bekerja sama dengan ILO untuk melatih tentara anak dan kelompok rentan lainnya dalam praktek bisnis secara dasar dan keterampilan yang menghasilkan uang.<sup>35</sup>

## **2. Implementasi Pengaturan Perlindungan Terhadap Tentara Anak (*child soldier*) Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional.**

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Dalam hukum internasional yang terpenting adalah prinsip penghormatan jiwa manusia, kebebasan dan keamanan pribadi yang dirumuskan sekaligus dalam pengertian perlindungan, perawatan dan bantuan yang diberikan kepada para korban konflik bersenjata. Prinsip kemanusiaan, penghormatan jiwa, kebebasan dan keamanan pribadi dan prinsip perlindungan para korban kejahatan dan atau

---

<sup>35</sup><https://www.child-soldiers.org/Pages/News/Category/news> diakses pada tanggal 4 April 2017 16:48 WITA

penyalahgunaan kekuasaan, serta ketentuan khusus bagi perlindungan kelompok-kelompok rentan dapat ditemukan dalam hukum hak asasi manusia dan dalam hukum internasional.

Kapan dan dimanapun hak-hak dan kebebasan semua orang termasuk anak-anak wajib dilindungi dan dihormati, baik yang ditegaskan dalam hukum hak asasi manusia maupun dalam hukum internasional. Bila suatu negara dalam keadaan konflik bersenjata atau kerusuhan dan ketegangan internal, atau dibawah keadaan darurat yang diumumkan, tidak boleh menghilangkan kewajiban tersebut, juga tidak dapat diberlakukan sebagai pembenaran bagi tidak dipatuhinya hak-hak dan kebebasan dasar.

Konflik bersenjata tidak terjadi seketika. Keadaan demikian merupakan hasil dari kemerosotan hukum dan ketertiban di suatu negara yang merupakan tanggung jawab utama pemerintah dan organisasi-organisasi penegak hukum. Peristiwa-peristiwa perekrutan, penggunaan, penculikan, pelecehan, dan pembunuhan anak, merupakan bukti bahwa terjadi pelanggaran hak azasi manusia secara masif. Perampasan hak individu selalu menjadi pusat perhatian internasional karna isu kemanusiaan bersifat universal. Keamanan kemanusiaan sudah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional sehingga penyelesaian masalah kemanusiaan ini memerlukan campur tangan pihak lain di luar negara.

Hingga saat ini konflik bersenjata masih terus terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga perekrutan anak sebagai tentara tidak dapat dihindari. Bahkan sebaliknya, justru memperluas perekrutan dengan tujuan memperbesar kekuatan militer mereka guna melawan. Momentum konflik internal ini menyebabkan banyak kerugian secara nasional karena infrastruktur mengalami kerusakan, terjadi pelanggaran HAM, dan stabilitas keamanan negara semakin terganggu. Walaupun telah banyak negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen perlindungan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut, tidak selalu berpengaruh positif terhadap kualitas perlindungan anak.

Pengaruh kuat yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan dari negara-negara perekrut tentara anak harus diakui memang belum bisa dihentikan. Dalam prosesnya, hampir seluruh negara perekrut tentara anak menjalankan roda pemerintahan secara otoriter. Hal ini yang menyebabkan intervensi UNICEF sebagai organisasi internasional belum bisa membawa perubahan banyak.

Dalam masa damai, di lingkup nasional, perlindungan anak sangat tergantung dari kemauan politik (*political will*) suatu negara daripada pihak lain seperti institusi internasional (misalnya PBB) atau penerapan instrumen hukum internasional (misalnya *UN Convention on the Rights of the Child*). Sebab, setiap negara akan menggunakan

kedaulatannya secara penuh untuk menentukan setiap kebijakan dalam mengatur negaranya. Institusi internasional seperti PBB atau instrumen hukum internasional memiliki berbagai keterbatasan untuk ‘memaksakan’ kekuatan dan kewenangannya.

Selain itu, peran negara sebagai pelaksana dan penanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum menjadi kendala utama selanjutnya dengan munculnya indikator ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*).

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap tentara anak cukup efektif, mengingat banyaknya negara yang meratifikasi peraturan–peraturan hukum mengenai hal tersebut. Namun, secara regulasi tidak semua peraturan-peraturan hukum tersebut bersifat mengikat (*legally binding*) dan memberikan efek jera kepada para pelaku atau pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan – peraturan tersebut.

Berdasarkan laporan *United Nations Human Rights Watch* 19 orang yang semuanya berasal dari Afrika telah didakwa bersalah atas perekrutan anak di bawah umur sebagai tentara. Selain dakwaan perekrutan anak di bawah umur, mereka pun didakwa atas tindakan kejahatan perang lainnya, seperti; pembunuhan massal, penculikan, pemerkosaan, dan kerja paksa. Hingga saat ini, belum ada pelaku perekrutan tentara anak dari luar Afrika yang didakwa bersalah.

NEGARA	PELAKU	ORGANISASI MILITER	STATUS HUKUM
Kongo	Thomas Lubanga Dyilo	Union of Conglese Patriot	Divonis bersalah oleh ICC dengan hukuman 14 tahun penjara
Kongo	Germain Katanga	Patriotic Forces of Resistane	Divonis bersalah oleh ICC dengan hukuman 12 tahun penjara
Kongo	Mathieu Ngudjolo Chui	Conglese Army, National Integrationist Front, Patriotic Resistance Force in Ituri	Divonis tidak bersalah oleh ICC namun mendapatkan <i>travel ban</i> oleh PBB
Kongo	Kyungu Mutanga	Mai Mai	Divonis bersalah oleh Pengadilan Provinsi Katanga, Kongo dengan hukuman mati
Kongo	Jean-Pierre Biyoyo	Mudundu 40	Divonis bersalah oleh pengadilan militer Kongo dengan hukuman 5 tahun penjara, namun berhasil melarikan diri
Kongo	Bosco Ntaganda	Union of Conglese Patriot	Proses persidangannya masih berlangsung di ICC
Libya	Charles Taylor	Mantan Presiden Libya	Proses persidangannya masih berlangsung di Sierra Leone
Sierra Leone	Alex Tamba Brima	Armed Forces Revolutionary Council	Divonis bersalah oleh Pengadilan Khusus Sierra Leone dengan hukuman 50 tahun penjara
Sierra Leone	Brima Bazy Kamara	Armed Forces Revolutionary Council	Divonis bersalah oleh Pengadilan Khusus Sierra Leone dengan hukuman 45 tahun penjara
Sierra Leone	Santigie Borbor Kanu	Armed Forces Revolutionary Council	Divonis bersalah oleh Pengadilan Khusus Sierra Leone dengan hukuman 50 tahun penjara
Sierra Leone	Allieu Kandewa	Civil Defense Forces	Divonis bersalah oleh Pengadilan Khusus Sierra Leone dengan hukuman maks. 20 tahun penjara
Sierra Leone	Issa Sesay	Revolutionary United Front	Divonis bersalah oleh Pengadilan Khusus Sierra Leone dengan hukuman maks. 52 tahun penjara
Sierra Leone	Morris Kallon	Revolutionary United Front	Divonis bersalah oleh Pengadilan Khusus Sierra



			Leone dengan hukuman maks. 39 tahun penjara
Sierra Leone	Augustine Gbao	Revolutionary United Front	Divonis bersalah oleh Pengadilan Khusus Sierra Leone dengan hukuman maks. 25 tahun penjara
Uganda	Joseph Kony	Lord's Resistance Army	Buronan ICC sejak tahun 2006
Uganda	Vincent Otti	Lord's Resistance Army	Dilaporkan tewas tahun 2007
Uganda	Raska Lukwiya	Lord's Resistance Army	Dilaporkan tewas tahun 2006
Uganda	Okot Odhiambo	Lord's Resistance Army	Buronan ICC sejak tahun 2006
Uganda	Dominic Ongwen	Lord's Resistance Army	Buronan ICC sejak tahun 2006

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Tentara anak bukan hanya mereka yang bekerja sebagai kombatan, tetapi juga semua orang yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja sebagai pengantar barang, pengirim pesan, tukang masak, petugas kebersihan, dan juga mereka yang dilibatkan untuk tujuan seksual.

Apapun alasannya, keterlibatan anak di dalam militer adalah kejahatan kemanusiaan. Karena setiap anak memiliki hak sebagaimana yang dituangkan dalam Konvensi Anak, yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga keamanan.

Pencegahan perekrutan anak sebagai tentara menjadi prioritas utama hukum internasional. Dari mulai di keluarkannya Konvensi Jenewa tahun 1949 sampai saat ini, seperangkat hukum dan resolusi-resolusi dan kesepakatan-kesepakatan telah dikeluarkan oleh berbagai negara dan organisasi internasional, terutama PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa di dunia. Namun kenyataannya, berbagai pasal yang mengatur hal tersebut masih banyak dilanggar. Ketika terjadi sebuah pelanggaran, yang berperang sebagai penegak hukum adalah hukum nasional masing-masing negara. Sehingga tanpa keinginan dan perjuangan yang teguh

untuk menegakannya maka konvensi dan revolusi tidak akan efektif.

## **2. Saran**

Untuk mengantisipasi pelibatan anak dalam militer atau kejahatan lain, kiranya faktor pendidikan, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penentu. Berdasar pengalaman di Kamboja, Sierra Leone, dan berbagai negara berkembang, anak yang dilibatkan militer, mereka tidak mengenyam pendidikan, kehidupan ekonomi keluarganya terimpit, dan lingkungan yang tidak kondusif.

Dalam memperbaiki kondisi tersebut maka diperlukan upaya serius dan menyeluruh, baik itu perbaikan ekonomi yang merata juga tentunya dibarengi dengan perbaikan sistem hukum. Dan keseluruhan hal tersebut merupakan kewajiban negara.

Setiap negara seharusnya bersikap tegas dalam mengawasi dan melindungi anak terhadap praktik perekrutan anak sebagai tentara dan menghukum pelakunya dengan seberat-beratnya. Selain itu, negara anggota harus lebih serius terhadap penerapan berbagai konvensi hukum internasional yang khusus melindungi anak dan kepentingan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Teknis pelaksanaan yang akurat dan tepat dengan dasar konsep pemikiran mencegah lebih baik dari pada mengobati yaitu; sebelum terjadi perekrutan tentara anak. UNICEF beserta

organisasi-organisasi Internasional turun ke daerah konflik untuk mengkondisikan suatu penerapan kerja lapangan yang akan mencegah perekrutan tentara anak dengan cara memberikan sosialisasi kepada pihak orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membawa anak-anak dibawah umur ke penampungan guna perlindungan, pembinaan, pendidikan dan hal-hal lain berkaitan dengan survival untuk membekali anak-anak agar tetap mendapatkan hak mereka yang sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak anak dan aturan lainnya yang diatur dalam Hukum Internasional.

PBB sebagai organisasi internasional, seharusnya dapat secara tegas menerapkan sanksi-sanksi kepada negara yang melanggar konvensi dan resolusi. Jika faktor politik dan ekonomi lebih dikedepankan daripada aturan hukum, maka resolusi dan konvensi hanya akan menjadi tulisan yang tertuang dalam meja-meja perjanjian. Diperlukan kesadaran bahwa dalam situasi apapun ketika perang, masalah pokoknya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil khususnya wanita dan anak-anak.

Tidak ada toleransi bagi negara manapun yang melakukan kejahatan perang walaupun itu bagi negara yang didukung oleh negara besar sekalipun. PBB dapat memberikan sanksi tegas yang harus dipatuhi negara tersebut tanpa syarat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kusumaatmadja, Mochtar. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum Cetakan Ke IV. Jakarta: Bina Cipta Umum.

Ambarwati., Ramadhany, Denny., Rusman, Rina. (2012) *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

KGPH. Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sefriani. (2012). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Brierly, J.L. (2003). *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Damai Internasional*. Jakarta: Bhratara.

Istanto, Sugeng. (2009). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Suwardi, Sri Setianingsih. (1980). *Intisari Hukum Internasional Publik*. Bandung: Penerbit Alumni.

Effendi, A. Masyhur. (1980). *Tempat Hak – Hak Azasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni

Mauna, Boer. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumni.

Haryomataram.(2005). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Beah, Ishmael. (2008). *A Long Way Gone – Memoar Seorang Tentara Anak*. Yogyakarta: PT.Bentang Pustaka.

Kuper, Jenny. (1997). *International Law Concerning Child Civilians In Armed Conflict*. Oxford: Clarendon Press.

Denov, Myriam. (2010). *Child Soldiers – Sierra Leone’s Revolutionary United Front*. New York: Cambridge University Press.

#### **Sumber Internet**

[http://www.google.co.id/Hubungan-Internasional: Esensi-dan-Mengapa-Harus-Mempelajarinya.html](http://www.google.co.id/Hubungan-Internasional:Esensi-dan-Mengapa-Harus-Mempelajarinya.html),.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Military\\_use\\_of\\_children](http://en.wikipedia.org/wiki/Military_use_of_children), *Military use children*.

<https://www.warchild.org.uk/issues/child-soldiers>.

<http://childrenandarmedconflict.un.org/children-not-soldiers/>

[www.unicef.org/emerg/files/childsoldiers.pdf](http://www.unicef.org/emerg/files/childsoldiers.pdf).

[http://www.unicef.org/protection/index\\_armedconflict.html](http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html), UNICEF. 2011. *Child Protection from Violence Exploitation and Abuse*.

[www.child-soldiers.org](http://www.child-soldiers.org) Child Soldiers Global Report 2004 hlm 13.

[www.savethechildren.net](http://www.savethechildren.net), *History of Save The Children*,

<http://www.refworld.org/docid/486cb0df1a.html>UNICEF, *Rapis Assesment on the Situation of Child Soldiers in Afghanistan*, July 2003, cited in Child Soldier: Global Report 2008.

[www.wawker.com/2014/12/10-negara-perekrut-tentara-anak-di-dunia](http://www.wawker.com/2014/12/10-negara-perekrut-tentara-anak-di-dunia).

[daniputralaw.blogspot.co.id/2015/06/kasus-penggunaan tentara-anak-di-sierra.html?m=1](http://daniputralaw.blogspot.co.id/2015/06/kasus-penggunaan-tentara-anak-di-sierra.html?m=1)

<https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-child-soldiers>

<http://toentas.com/portal/berita/indonesia/terkini/nasional/baca/Nasib-Tragis-Tentara-Anak.html>

<http://www.dw.com/id/myanmar-diduga-miliki-serdadu-anak-terbanyak-di-dunia/a-5242205>

<http://syafiie.blogspot.co.id/2011/04/perlindungan-anak-dalam-hukum-humaniter.html>

<https://lovetya.wordpress.com/2008/12/12/perlindungan-anak-dalam-konflik-bersenjata/>

<http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/16/08/24/ocep029-usia-muda-yang-terperangkap-konflik>

<https://www.unicef.org/childsurvival/>

<http://www.humanium.org/en/child-soldier/>

## **Jurnal**

Eddyono, Supriyadi W. (2005). *Seri bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara X: Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Agus, Fadillah. (Ed) (1997). *Hukum Humaniter: Suatu Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

(1999). *Hukum Humaniter : Kumpulan Tulisan. Diterbitkan dalam rangka memperingati 50 tahun Konvensi Jenewa 1949*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Irwanto, Ph.D. *Analisa Konsep Perlindungan Anak dan Implementasinya di Indonesia: Kajian Awal*. Jakarta.

Narwati, Enny., Hastuti, Lina. (2008) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata*.

Abdullah, Maman. *Kajian Hukum Humaniter dalam Konflik Sierra Leone yang Melibatkan Tentara Anak*.

Child Soldiers International. (2009) *Louder Than Words – An agenda for action to end state use of child soldiers*. London: Child Soldiers International.

## **Skripsi**

Prakoso, Agus. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan Lebanon (studi normatif tentang implementasi Konvensi Jenewa IV 1949)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sirait, Dorma Elvrianty. (2014). *Peran UNICEF dalam Menangani Tentara Anak di Myanmar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 MAKASSAR 90245  
Telepon : (0411) 587219, 584000, 584686, Fax : (0411) 587219, 584000, 584686  
Email: fhuh@indosat.net.id

Nomor: 182 /RB-FH/I/2016

Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa:

Nama : Adillah Alifya Arzam  
Nomor Pokok : B111 12 151  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : S1-Hukum Internasional  
Alamat : Jl. Klabat No. 36 Perumahan Bukit Baruga, Antang

Telah melakukan penelitian di Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI TENTARA (CHILD SOLDIER) DALAM KONFLIK BERSENJATA"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 03 Oktober 2016  
Kepala Perpustakaan,



Dr.Hj. Haerannah, S.H., M.H  
Nip. 19661212 199103 2002

